

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris apakah pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan asuransi syariah yang terdaftar sebagai anggota Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) selama periode 2015-2024 dapat dibuktikan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Keahlian Dewan Pengwas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang keahlian anggota DPS belum mampu menekan praktik *tax avoidance*.
2. Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Jumlah anggota DPS yang lebih besar belum mampu menekan tindakan penghindaran pajak perusahaan.
3. Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Jumlah anggota komisaris dalam perusahaan tidak menentukan tingkat kepatuhan pajak.
4. Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Maka semakin besar proporsi komisaris independen, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.
5. Konsentrasi Kepemilikan Saham tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan mayoritas dalam perusahaan tidak terbukti mempengaruhi kebijakan pajak.
6. Kepemilikan Asing tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Kepemilikan asing pada perusahaan tidak mempengaruhi tingkat *tax avoidance* karena masih tunduk pada regulasi domestik.

Dengan demikian, hanya proporsi komisaris independen yang terbukti berperan penting dalam menekan praktik penghindaran pajak, sedangkan variabel lain tidak memberikan pengaruh signifikan.

5.2 Implikasi Penelitian

Penelitian ini memberikan beberapa implikasi, baik secara teoretis maupun praktis. Hasil penelitian mendukung teori keagenan, khususnya peran mekanisme good corporate governance melalui komisaris independen dalam mengurangi konflik kepentingan dan menekan praktik oportunistik manajemen seperti *tax avoidance*. Penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai faktor-faktor tata kelola perusahaan yang memengaruhi kebijakan perpajakan di Indonesia, khususnya dalam konteks peran DPS, dewan komisaris, dan struktur kepemilikan.

Bagi regulator, temuan penelitian ini menegaskan pentingnya memperkuat aturan mengenai proporsi komisaris independen, karena terbukti berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Bagi perusahaan, hasil ini menunjukkan perlunya meningkatkan kualitas anggota DPS dan komisaris agar fungsi pengawasan berjalan lebih optimal, bukan hanya sekadar memenuhi jumlah minimal sesuai regulasi.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan:

1. Variabel independen pada penelitian ini hanya mewakili sebagian kecil dari banyak faktor yang dapat memengaruhi *tax avoidance*. Meskipun variabel independen pada penelitian ini mencakup banyak aspek, yakni keahlian DPS, ukuran DPS, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, konsentrasi kepemilikan saham, dan kepemilikan asing, tetapi nilai koefisien determinasi hanya menunjukkan angka sebesar 0,120 (12%). Nilai ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang diuji pada penelitian ini hanya memiliki pengaruh sebesar 12% saja terhadap variabel dependen. Nilai sisanya sebesar 88% menunjukkan adanya kemungkinan terdapat variabel lain yang dapat memengaruhi *tax avoidance*.
2. Pengukuran variabel *tax avoidance* hanya menggunakan pendekatan akuntansi, sehingga belum sepenuhnya menangkap kompleksitas praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

5.4 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi *tax avoidance*, seperti profitabilitas, *leverage*, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, serta variabel tata kelola tambahan seperti frekuensi rapat DPS atau komite audit. Penambahan variabel tersebut diharapkan dapat memperkaya model penelitian dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan perpajakan pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia.
2. Mengingat penelitian ini hanya menggunakan pendekatan akuntansi melalui *Effective Tax Rate* (ETR), penelitian mendatang dapat mempertimbangkan pengukuran alternatif seperti *Book-Tax Differences* (BTD), *Cash Effective Tax Rate* (CETR), atau indeks GAAP ETR. Pendekatan tersebut dinilai mampu menggambarkan perilaku penghindaran pajak secara lebih mendalam dan mengurangi potensi bias pengukuran yang bersifat akuntansi semata.
3. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas jumlah sampel perusahaan serta memperpanjang periode observasi agar hasil yang diperoleh lebih stabil dan representatif. Penggunaan data lintas sektor juga dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap praktik *tax avoidance* di berbagai jenis perusahaan.
4. Untuk meminimalkan potensi bias, peneliti selanjutnya dapat memanfaatkan lebih dari satu sumber data sekunder, seperti laporan keuangan auditan, laporan tata kelola, maupun publikasi Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, penggunaan metode analisis seperti panel data regression atau robust regression dapat memperkuat validitas hasil penelitian.